

**PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK USAHA
PERKEBUNAN RAMIE DAN KOPI DI NAGARI TIGO BALAI
KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM**

UNIVERSITAS ANDALAS
TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan*



Oleh

LARAS NIKITA RALVI
NIM. 2220123008

Pembimbing :

Prof.Dr.Kurnia Warman,S.H.,M.Hum

Dr.Hengki Andora,S.H.,LLM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTA SHUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK USAHA
PERKEBUNAN RAMIE DAN KOPI DI NAGARI TIGO BALAI
KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM**

*(Laras Nikita Ralvi, 2220123008, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 87 Halaman, 2024)*

ABSTRAK

Terkait dengan perjanjian pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha perkebunan termasuk ranah atau peristiwa perdata dimana terjadi pelepasan atau pengalihan hak milik atas suatu kebendaan oleh seseorang yang berhak dalam hal ini adalah penguasa tanah ulayat, Namun pada kenyataannya dalam surat pernyataan kesepakatan tersebut ada butir kesepakatan yang tidak dipenuhinya yaitu janji pihak investor memberikan imbalan kepada anak/kemenakan pemilik tanah ulayat yakni 5% dari hasil perkebunan basah sebelum diolah dan tanah ulayat tersebut tidak dikelola secara optimal sebagaimana janji pihak investor pada saat kesepakatan dengan Ninik Mamak yang mewakili masyarakat Desa Saribulan hingga saat ini masih ditelantarkan oleh perusahaan tersebut, dan hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat hukum adat sekitar. hingga jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian adalah tidak dipenuhi oleh pihak investor selama masa kesepakatan pengelolaan tanah ulayat adalah janji investor memberikan imbalan kepada anak/kemenakan pemilik tanah ulayat Desa Saribulan sebesar 5% dari hasil perkebunan basah hal ini mengakibatkan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Niniak Mamak Nan XX dan masyarakat hukum adat disekitar tanah ulayat, peraturan perundang-undangan pemegang hak guna usaha wajib mengusahakan dan mengelola tanah tersebut, namun pada kenyataannya tanah tersebut tidak dikelola dengan baik dan ditelantarkan begitu saja dikarenakan krisis ekonomi tahun 1998 mengakibatkan perusahaan bangkrut hingga waktu Hak guna usaha nya berakhir tanah tersebut ditelantarkan. Kepastian hukum yang terjadi jika Perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dan dikarenakan Perusahaan tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaanya melalui Reforma Agraria, Program strategis negara, dan Cadangan negara lainnya

Kata kunci: Pemanfaatan, Tanah Ulayat Nagari, Perkebunan, Hak Guna Usaha

Utilization of Customary Land (*Tanah Ulayat*) for Plantation Ramie and Coffee Businesses in Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, West Sumatra, Indonesia

(Laras Nikita Ralvi, 2220123008, Master's Thesis, Magister Kenotariatan, Faculty of Law, Universitas Andalas, 87 Pages, 2024)

ABSTRACT

The utilization of customary land (*tanah ulayat*) for plantation businesses in Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, West Sumatra, Indonesia, raises legal concerns regarding the agreement between the customary landowning community and the plantation company. This agreement involves the transfer of ownership rights over land, and the study examines the fulfillment of obligations and the consequences of non-compliance. Employing a juridical-empirical approach, the research utilizes primary and secondary data gathered through interviews and document analysis. The findings reveal that the plantation company has breached the agreement by failing to deliver the promised compensation of 5% of the gross plantation yield to the descendants of the customary landowners. This breach of contract has caused financial losses to the Niniak Mamak Nan XX and the surrounding customary law community. Additionally, the company has neglected to properly manage the land, leaving it abandoned since the 1998 economic crisis. The study concludes that the company's non-compliance warrants legal action and the potential application of land reform measures to reclaim the abandoned land. It emphasizes the significance of upholding legal principles and safeguarding customary land rights in the context of business ventures.

Keywords: *Utilization, Customary Land (Tanah Ulayat), Plantation, Cultivation Rights (HGU)*